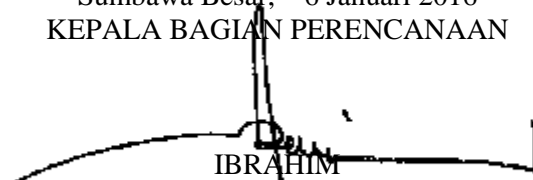


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA

DATASOP INISIATIF BAGIAN PERENCANAAN TAHUN 2016

NO	JENIS	TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1	SOP YANG DIBUAT OLEH KABAG REN	TAHUN 2016	SOP BAGIAN PERENCANAAN POLRES SUMBAWA	1	

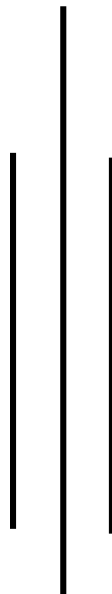
Sumbawa Besar, 6 Januari 2016
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN


IBRAHIM
KOMISARIS POLISI NRP 65050341

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA



**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BAGIAN PERENCANAAN POLRES SUMBAWA**



Sumbawa Besar, Januari 2016

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BAGIAN PERENCANAAN POLRES SUMBAWA**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

- a. Bahwa institusi Polri tidak pernah lepas dari sorotan publik karena memiliki tugas pokok, fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi Pemerintahan Negara dibidang Pemeliharaan Kamdagri/Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sehingga kinerja Polri perlu perencanaan dan anggaran yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional serta non operasional Polri pada umumnya dan Polres Sumbawa pada khususnya;
- b. Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan prima Polri sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja maka jajaran Polri telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi dilingkungan Polri baik menyangkut aspek instrumental, struktural dan kultural agar Polri lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima Polri secara berhasil dan berdaya guna;
- c. Terkait peran Bagian Perencanaan Polres Sumbawa sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri yang berada dibawah Kapolres Sumbawa dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Sumbawa. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari Kabag Ren dibantu oleh Subbag Progar dan Subbag Dalgar. Yang bertugas menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres Sumbawa antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres Sumbawa dalam bentuk DIPA, RKA-KL, Penetapan kinerja, KAK atau TOR dan RAB serta membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres Sumbawa dan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;
- d. Sementara itu Bagian Perencanaan saat ini dan kedepan harus mulai melakukan inventarisasi, pemetaan, mengkaji, meneliti secara holistik dan komprehensif terhadap berbagai perangkat instrument organisasi Polri, terutama menyangkut dalam perencanaan dan anggaran, apakah masih sesuai/relevan dengan situasi kondisi saat ini untuk dapat dilakukan penyusunan, penyempurnaan, revisi dan pembaruan sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan atau kerangka kerja bagi Polres Sumbawa dalam rangka memberikan kontribusi guna meminimalisir kesalahan dalam perencanaan dan anggaran;

- e. Dalam rangka untuk kesamaan visi, persepsi dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan prima Polri melalui Sentra Pelayanan Masyarakat maka dipandang perlu membuat naskah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan (Bag Ren) Polres Sumbawa yang mengatur secara tegas dan jelas reaktulisasi kegiatan unsur pelaksana staf Polri di Bagian Perencanaan Polres Sumbawa secara terpadu, tertib dan terkoordinasi;
- f. Dengan penyusunan SOP Bagian Perencanaan Polres Sumbawa dimaksud adalah merupakan pedoman dasar, acuan / kerangka kerja bagi unsur pelaksana Bagian Perencanaan Polres Sumbawa dan diharapkan akan dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan yang output dan outcomenya dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh masyarakat pada umumnya dan personil Polres Sumbawa pada khususnya.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sisrenbangnas;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang RKP;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2005 tentang RPJMN;
- h. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 22 /X /2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477);
- i. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 23 / X / 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 478).

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan Polres Sumbawa adalah :

- 1) Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelaksana staf Bagian perencanaan Polres Sumbawa dalam memenuhi kebutuhan operasional serta non operasional Polri pada umumnya dan Polres Sumbawa pada khususnya kegiatan secara terpusat untuk Polres Sumbawa dan Jajaran sehingga lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada umumnya dan personil Polres Sumbawa pada khususnya;

- 2) Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP Bagian Perencanaan agar mudah dipahami oleh seluruh personil Polres Sumbawa dari tingkat terendah sampai yang tertinggi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan Polres Sumbawa adalah :

- 1) Untuk menjamin pemahaman prinsip – prinsip dasar terhadap SOP Pada Bagian Perencanaan Polres Sumbawa sehingga tidak ragu – ragu dalam melaksanakan tugasnya ;
- 2) Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar SOP guna terwujudnya persamaan visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam membuat perencanaan dan anggaran Polres Sumbawa kepada personil sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran serta memudahkan dalam pelaksanaannya;
- 3) Sebagai pedoman atau kerangka kerja bagi unsur pelaksana Bagian Perencanaan Polres Sumbawa agar selalu mendasari prinsip – prinsip yang terkandung didalam Standar Operasional Prosedural (SOP) Bagian Perencanaan Polres Sumbawa dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok fungsi dan perannya.

4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedural (SOP) Bagian Perencanaan Polres Sumbawa meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Bagian Perencanaan Polres Sumbawa khususnya unsur–unsur perencanaan dan anggaran Polres Sumbawa;
- b. Standar kinerja Bagian Perencanaan Polres Sumbawa agar berhasil dan berdaya guna dilingkungan Polres Sumbawa dan Jajaran.

5. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar;
3. Maksud dan Tujuan ;
4. Ruang Lingkup ;

5. Sistematika.

BAB II TUGAS POKOK

BAB III PELAKSANAAN

1. Personel yang dilibatkan ;
2. Ketentuan dan kewajiban dalam penyusunan Renja Satker Jangka Pendek dan Menengah;
3. Langkah – langkah dalam penyusunan Pagu ;
4. Langkah – langkah revisi DIPA / RKA – KL.

BAB IV ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN

BAB V PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK

Kabag Ren bertugas sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolres Sumbawa dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Sumbawa. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari Kabag Ren Dibantu oleh Subbag Progar dan Subbag Dalgar. Yang bertugas menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres Sumbawa antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja serta rencana kebutuhan anggaran Polres Sumbawa dalam bentuk RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR dan RAB serta membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun serta membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

A. Unsur Bagian Perencanaan, meliputi :

1. Bagian Paurmin;
2. Bagian Subbag Progar;
3. Bagian Subbag Dalgar.

B. Unsur Pelaksana Utama Bagian Perencanaan, meliputi :

1. Kabag Ren;
2. Paurmin;
3. Kasubbag Progar;
4. Kasubbag Dalgar;
5. Bamin/Banum.

BAB III PELAKSANAAN

6. Personil yang dilibatkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Satu Pamen Gol. IV Kabag Ren ;
- b. Satu Bintara Gol. II f Paurmin Bag Ren;
- c. Satu Perwira Gal. III c Kasubag Progar;
- d. Satu Perwira Gol. III b Kasubag Dalgar
- e. Satu Bintara Gol. II b Paur Subbag Dalgar;
- f. Satu Bintara Gol. II d Paur Subbag Progar;
- g. Dua Bintara Gol II c Bamin.

7. Ketentuan dan kewajiban dalam penyusunan Rencana Kerja Satker Pendek dan Jangka Menengah :

a. Langkah - langkah dasar penyusunan Lakip dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja Penyusunan Lakip yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Rapat Pokja guna penyusunan Lakip dengan materi :
 - a) Membuat ikhtisar eksklusif;
 - b) Pendahuluan;
 - c) Rencana strategi dan Penetapan Kinerja;
 - d) Akuntabilitas kinerja;
 - e) Penutup.
- 3) Melaksanakan rapat Pokja penyusunan Lakip dengan mengumpulkan data-data dari Subsatker berupa :
 - a) beberapa hal-hal penting tentang dalam perencanaan dan pengkajian kewajiban (dokumen Penetapan Kinerja);
 - b) pencapaian sasaran organisasi, pengungkapan dan penyelesaian dari hasil pengukuran kinerja masing-masing.
- 4) Setelah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan dan diakui keabsahannya oleh masing - masing Subsatker maka laporan Lakip ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dari masing – masing subsatker setiap bulannya.

- 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah siap untuk dilaporkan ke Polda NTB paling lambat pada bulan Januari.

b. Langkah - langkah dasar penyusunan Penetapan Kinerja dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja Penyusunan Penetapan Kinerja yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai dasar pembuatan Penetapan Kinerja berupa :
 - a) Renstra;
 - b) Rencana kerja tahunan (RKT);
 - c) Dukungan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Subsatker untuk merencanakan / merumuskan janji para Kasubsatker kepada Kasatker untuk mencapai target kinerja tahunan sekaligus sebagai dasar perjanjian Kasatker untuk melaksanakan dan mencapai target kinerja pada tahun anggaran berjalan;
- 4) Penetapan Kinerja yang dibuat paling lambat pada bulan januari pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Penetapan Kinerja telah siap untuk dilaporkan ke Polda NTB.

c. Langkah - langkah dasar penyusunan analisa dan evaluasi Rencana Kerja dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan analisa dan evaluasi Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Melaksanakan Rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejajaran Polres Sumbawa guna membahas program-program yang telah dilaksanakan dan dukungan anggaran yang telah terserap berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker untuk rencana kerja tahun yang akan datang;
- 3) Kabag Ren mengumpulkan data-data dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker tentang pelaksanaan renja sebagai bahan analisa dan evaluasi rencana kinerja yang telah berjalan, dibuat rutin setiap tahunnya sebagai laporan keberhasilan dan hambatan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Ka sebagai bahan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang;

- 4) Setelah analisa dan evaluasi rencana kinerja ditetapkan, masing-masing Subsatker dapat melaksanakan rencana Kinerja pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan analisa dan evaluasi rencana kinerja;
- 5) Analisa dan evaluasi rencana kinerja telah siap untuk dilaporkan ke Polda NTB paling lambat bulan januari.

d. Langkah - langkah dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan rancangan rencana kerja yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Melaksanakan Rapat Pokja pada bulan januari dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejajaran Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan pada dan dukungan anggaran berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker untuk rencana kerja;
- 3) Kabag Ren mengumpulkan Rencana kerja tahunan masing – masing subsatker;
- 4) Setelah rancangan rencana kerja ditetapkan dan melaporkan rancangan renja tersebut ke Polda NTB.

e. Langkah - langkah dasar penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja Penyusunan Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker Jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Melaksanakan Rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek Sejajaran Polres Sumbawa guna membahas program - program yang akan dilaksanakan pada dan dukungan anggaran berikut hambatan - hambatan yang dihadapi serta saran dan masukan - masukan dari masing - masing Subsatker untuk rencana kerja dengan mendasari rencana yang sudah dibuat;
- 3) Kabag Ren mengumpulkan Rencana kerja tahunan masing – masing subsatker;
- 4) Setelah rencana kerja ditetapkan paling lambat bulan juni dan melaporkan renja tersebut ke Polda NTB.

f. Langkah - langkah dasar penyusunan Rencana Strategis dan revisi Renstra dilingkungan Satker Polres Sumbawa:

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan rencana strategis yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Rencana strategis dibuat berdasarkan masukan-masukan yang telah dibuat dari masing-masing Subsatker Polres Sumbawa;
- 3) Melaksanakan rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejajar Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan pada dan dukungan anggaran berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing- masing Subsatker untuk rencana kerja (Renstra dibuat 5 tahun sekali, Revisi Renstra tiap 3 tahun);
- 4) Kabag Ren mengumpulkan rencana strategis dari masing–masing pelaksana kegiatan di Polres Sumbawa;
- 5) Setelah rencana strategis ditetapkan dan melaporkan rencana strategis tersebut ke Polda NTB.

g. Langkah - Langkah dasar penyusunan analisa dan evaluasi Rencana Strategis dilingkungan Satker Polres Sumbawa (tiap tahun) :

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan analisa dan evaluasi rencana strategis yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker Jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Analisa dan evaluasi rencana strategis dibuat berdasarkan masukan-masukan yang telah dibuat dari masing-masing Subsatker Polres Sumbawa;
- 3) Melaksanakan rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejajar Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan dan dukungan anggaran berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker untuk rencana kerja;
- 4) Kabag Ren mengumpulkan analisa dan evaluasi rencana strategis dari masing–masing pelaksana kegiatan di Polres Sumbawa;
- 5) Setelah analisa dan evaluasi rencana strategis dibuat dan melaporkan anev rencana strategis tersebut ke Polda NTB.

h. Langkah - langkah dasar monitoring evaluasi anggaran dilingkungan Satker Polres Sumbawa (tiap bulan) :

- 1) Membuat Sprin pelaksanaan monitoring yang telah disahkan oleh Kasatker guna disampaikan sebagai bahan pemberitahuan kepada yang terlibat dalam kegiatan monitoring tersebut;
- 2) Memintakan kepada para pengguna anggaran berupa laporan hasil atas pelaksanaan kegiatan guna menganalisa dan mengevaluasi anggaran sebagai bahan pengawasan anggaran;
- 3) Membuat laporan mengenai kegiatan monitoring evaluasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Subsatker serta memberi masukan kepada Subsatker untuk menjadi bahan pertimbangan Subsatker di masa yang akan datang;
- 4) Mencatat hasil dari Monitoring atas pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan dan anggaran yang telah digunakan oleh masing-masing Subsatker Polres Sumbawa guna sebagai bahan laporan ke Polda NTB.

8. Langkah-langkah dalam penyusunan Pagu Ideal,Indikatif dan Depinitif:

a. Penyusunan Pagu Ideal (Bulan Januari):

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan Pagu Ideal yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Pagu Ideal dibuat berdasarkan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker;
- 3) Melaksanakan rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejawaran Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan dan dukungan anggaran berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker untuk rencana kerja guna mendukung penyusunan Pagu Ideal;
- 4) Kabag Ren mengumpulkan Pagu Ideal dari masing – masing subsatker;
- 5) Setelah Pagu Ideal ditetapkan dan dilaporkan ke Polda NTB.

b. Penyusunan Pagu Indikatif:

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan Pagu Indikatif yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker Jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Pagu Indikatif dibuat berdasarkan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker;
- 3) Melaksanakan rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek sejawaran Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan dan dukungan anggaran berikut

hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker untuk rencana kerja guna mendukung penyusunan Pagu Indikatif;

- 4) Kabag Ren mengumpulkan Pagu Indikatif dari masing – masing subsatker;
- 5) Setelah Pagu Indikatif ditetapkan dan dilaporkan ke Polda NTB.

c. Penyusunan Pagu Definitif:

- 1) Membuat Sprin Pokja penyusunan Pagu Definitif yang telah disahkan oleh Kasatker guna sebagai bahan penyampaian di Subsatker jajaran Polres Sumbawa;
- 2) Pagu Definitif dibuat berdasarkan masukan-masukan dari masing-masing Subsatker;
- 3) Melaksanakan rapat Pokja dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek Sejawaran Polres Sumbawa guna membahas program-program yang akan dilaksanakan pada dan dukungan anggaran berikut hambatan-hambatan yang dihadapi serta saran-saran dan masukan-masukan dari masing- masing Subsatker untuk rencana kerja guna mendukung penyusunan Pagu Definitif;
- 4) Kabag Ren mengumpulkan Pagu Definitif dari masing – masing subsatker;
- 5) Setelah Pagu Definitif ditetapkan dan dilaporkan ke Polda NTB.

9. Langkah - langkah dalam Revisi DIPA / RKA – KL dilingkungan tingkat Satker Polres Sumbawa:

- 1) Revisi DIPA / RKA – KL dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kanwil dirjen perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Setelah menerima undangan dari Dirjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat, Satker Polres Sumbawa mengikuti sosialisasi revisi DIPA / RKA – KL sesuai peraturan menteri Keuangan tentang revisi DIPA / RKA – KL;
- 3) Satker Polres menyiapkan sprin POKJA perihal revisi DIPA / RKA – KL;
- 4) Satker Polres Sumbawa mengadakan Rapat Pokja revisi DIPA / RKA - KL dipimpin oleh Kapolres Sumbawa diikuti Wakapolres Sumbawa, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Para Kapolsek Sejawaran Polres Sumbawa guna membahas program - program yang akan dilaksanakan tentang kegiatan / Program yang berlum terdukung anggaran dan kegiatan / program yang dukungan anggarannya belum mencukupi dengan volume kegiatan;
- 5) Kabag Ren membuat surat ke Kapolda Nusa Tenggara Barat Up. Karorena dengan tembusan Dirjen Perbendaharaan Negara dan KPPN Perihal Revisi DIPA / RKA – KL disertai TOR dan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dan didukung oleh anggaran;

- 6) Pelaksanaan kegiatan anggaran akan disesuaikan dengan revisi DIPA / RKA – KL yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

BAB IV

ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan keberhasilan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag Ren tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran tingkat Satker Polres, ada 3 (tiga) faktor pendukung yang saling berkaitan dan terintegrasi meliputi hal - hal sebagai berikut :

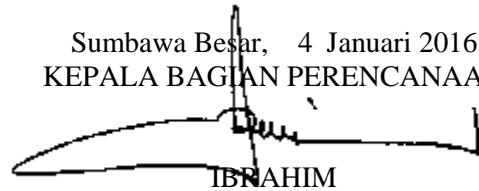
1. Sistem administrasi dan tata naskah penulisan, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag Ren Polres Sumbawa beserta lampiran – lampiran secara umum menggunakan tata naskah penulisan dinas Polri sebagaimana ketentuan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Aspek Dukungan Logistik, yang digunakan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan kegiatan Bag Ren Polres Sumbawa secara umum mengacu kepada Peraturan / ketentuan tentang pola pengadaan dan pembinaan logistik yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Aspek Dukungan Anggaran, yang digunakan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan, tahapan pengawasan dan pengendalian secara keseluruhan didukung / menggunakan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V

PENUTUP

1. Demikian penyusunan pedoman Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Bag Ren tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran tingkat Satker Polres Sumbawa dibuat agar dapat menunjang tugas pelaksanaan Bag Ren di lingkungan perencanaan anggaran secara terarah, tertib dan mencapai sasaran yang telah ditentukan;
2. Sebagai pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para unsur pengembangan tugas pada Bag Ren dalam rangka penyelenggaraan implementasi fungsi perencanaan umum dan anggaran, pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan;
3. Pada saat pedoman ini diberlakukan semua pedoman kerja dilingkungan Bag Ren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman.

Sumbawa Besar, 4 Januari 2016
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN



IBRAHIM
KOMISARIS POLISI NRP 65050341